

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki berbagai permasalahan daerah di berbagai bidang yang menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasinya. Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan ini, salah satu inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri atau yang biasa disebut dengan paradiplomasi. Melalui paradiplomasi, Pemerintah Kota Surabaya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah lain di luar negeri dengan tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan yang masih belum mampu diatasi dan menjadi tantangan besar selama ini. Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerahnya. Aktivitas paradiplomasi yang dijalankan Surabaya tidak hanya berperan besar dalam mengatasi permasalahan daerah, namun juga dapat mempererat hubungan diplomatik antara suatu daerah dengan daerah lain yang ada di luar negeri sebagai bentuk pelaksanaan politik bebas aktif.¹

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah dipimpin oleh seorang wali kota yang memegang otoritas tertinggi dalam merumuskan kebijakan-

¹ Takdir Ali Mukti. 2020. *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press. Hal. 1.

kebijakan yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Perkembangan paradiplomasi Kota Surabaya dinilai cukup signifikan berkat banyaknya kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh wali kota sebelum-sebelumnya. Dilantikannya Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya untuk periode 2021-2024 mengemban tantangan dalam bagaimana mempertahankan citra Kota Surabaya di kanvas internasional melalui kebijakannya. Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah daerah di luar negeri adalah kerja sama *sister city* atau kota kembar. Kerja sama ini terjalin antara dua kota yang bermitra dalam jangka pendek maupun panjang yang mencakup pertukaran sumber daya, teknologi, pengetahuan, serta promosi budaya. Kerja sama *sister city* yang terjalin antar pemerintah daerah memberikan berbagai manfaat, antara lain: membuka peluang pengelolaan pembangunan sesuai bidang kerja sama yang disepakati melalui transfer pengetahuan dan pengalaman; mendorong pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk aktif mencetuskan ide-ide baru; memperkuat hubungan persahabatan antara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dari kedua pihak; serta memungkinkan terjadinya transfer budaya yang memperkaya kekayaan budaya daerah.² Kerja sama ini dilandasi oleh keinginan untuk saling mengenal, membantu, dan memberikan manfaat bagi kota-kota yang terlibat, tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonomi maupun sistem sosial, serta melibatkan peran aktif masyarakat lokal.

² Inggang Perwangsa Nuralam. 2018. *Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City*. Journal of Applied Business Administration. Vol. 2 No. 1. Hal. 144-151.

Surabaya memulai program *sister city* pertamanya pada tahun 1991 melalui kolaborasi dengan Kota Seattle, Amerika Serikat. *Memorandum of Understanding* (MoU) resmi ditandatangani pada 27 September 1992 oleh kedua walikota, yaitu Norman B. Rice (Seattle) dan H. Poernomo Kasidi (Surabaya). Ruang lingkup kerja sama ini meliputi berbagai sektor, termasuk pendidikan, pengembangan usaha, serta seni dan budaya. Perkembangan ini terus berlanjut.³ Dan hingga 2024, Surabaya tercatat telah menjalin kemitraan *sister city* dengan 14 kota di berbagai negara, meskipun tidak semua kerja sama tersebut masih berstatus aktif.⁴

Pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kota Surabaya memanfaatkan paradiplomasi untuk mengatasi tantangan-tantangan lokal yang kompleks dan meningkatkan daya saing di kancah global. Berbagai kota di Indonesia telah berhasil membangun hubungan *sister city* dengan berbagai kota di berbagai belahan dunia, menjalin kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, hingga mengatasi permasalahan lingkungan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah.⁵ Salah satu contoh *sister city* di Indonesia yakni kerja sama antara kota Bandung dengan Seoul yang memiliki program pengembangan proyek *smart city*, hingga penerapan inovasi dan teknologi.⁶ Keberhasilan implementasi kerja sama *sister city* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola

³ Mutia Zakia Salma. 2015. *Analisis Peran Masyarakat Sipil Terhadap Efektivitas Dan Perkembangan Kerjasama Sister City: SSSCA (Seattle – Surabaya Sister City Association) Dalam Lima Periode Implementasi Kerjasama*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol. 4. No. 1. Hal. 1667-1683.

⁴ Mitra Kerja Sama Luar Negeri. Diakses dalam <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/mitra-luar-negeri/> (22/2/2025. 19.35 WIB)

⁵ Takdir Ali Mukti, *op. cit.*, hal. 16.

⁶ Renny Puspitarini. dkk. 2021. *Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerjasama Smart City Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul*. PERSPEKTIF. Vol. 10. No. 2. hal. 569-577.

dan memanfaatkan peluang internasional secara efektif, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendukung otonomi daerah dalam menjalankan paradiplomasi.⁷

Mengingat bahwa citra Kota Surabaya di kancah internasional perlu dipertahankan demi mempertahankan daya saing kota Surabaya di kancah internasional serta menjaga hubungan baik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra luar negerinya, Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan perhatian khusus dalam mengimplentasikan paradiplomasi. Paradiplomasi tidak hanya mendukung visi dan misi kota, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi. Dengan memanfaatkan jaringan kerja sama internasional, Surabaya dapat memperoleh pengetahuan, teknologi, dan investasi yang dapat mempercepat pembangunan dan dalam jangka panjang dapat memperbaiki kualitas hidup warganya.⁸ Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplor bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan kerja sama luar negeri demi mempertahankan eksistensi Kota Surabaya di kancah internasional. Citra kota Surabaya yang selama ini telah dibangun harus dipertahankan, namun bagaimana cara mempertahankan citra tersebut berbeda-beda tergantung dari bagaimana pemerintah daerah tersebut mengimplementasikannya.

⁷ Annisa Nadya. dkk. 2023. *Strategizing Sister City Partnerships: Paradiplomacy, Bilateral Relations, and Sustainable Cooperation in Indonesia*. Journal of Paradiplomacy and City Networks. Vol. 2. No.1. hal. 46-57.

⁸ *Ibid.*

Implementasi paradiplomasi Kota Surabaya ini harus sejalan dengan visi Kota Surabaya, yakni: “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”, dan misi Kota Surabaya yang pertama, yakni “Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan Dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional”. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2021-2026 pada Subkoordinator Kerjasama di bawah Sekretariat Daerah, kemitraan internasional yang dibangun Pemerintah Kota Surabaya ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga, dengan strategi utama memperluas jaringan kerjasama Surabaya dengan berbagai mitra luar negeri.⁹

Topik penelitian ini dipilih karena Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia mempunyai peran strategis dalam menjalankan paradiplomasi yang telah lama menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Sejak tahun 1992, Surabaya aktif memperluas jaringan kerja sama internasional pada berbagai bidang, seperti contohnya ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Wali Kota Eri Cahyadi selaku pemegang otoritas tertinggi di Pemerintah Kota Surabaya merumuskan kebijakannya terkait paradiplomasi Kota Surabaya dan dampaknya terhadap perkembangan kota, mengingat dibutuhkan peningkatan hubungan internasional dalam konteks

⁹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026*, Surabaya: Bappedalitbang, Bab II hal. 163

pemerintahan daerah. Dipilihnya masa kepemimpinan Eri Cahyadi periode 2021-2024 adalah karena pada masa tersebut terdapat sedikit perbedaan dari arah kebijakan terkait paradiplomasi dibandingkan dengan wali kota sebelumnya. Masa jabatan Wali Kota Eri Cahyadi periode 2021-2024 menjadi fokus penelitian untuk menilai bagaimana Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi melanjutkan dan memperkuat warisan kerja sama internasional yang telah dirintis oleh pendahulunya, di tengah kebutuhan akan peningkatan hubungan global untuk mendukung pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama luar negeri kota Surabaya di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi pada periode tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi mengimplementasikan kerja sama luar negeri kota Surabaya. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri, serta mengetahui apakah upaya tersebut berpengaruh terhadap citra kota Surabaya di kancah internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan komprehensif mengenai peran kepemimpinan kepala daerah dalam memperkuat citra sebuah kota melalui kerja sama internasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang paradiplomasi dan kerja sama internasional di tingkat pemerintah daerah. Dengan memfokuskan pada implementasi kerja sama luar negeri Kota Surabaya di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran strategis kota-kota di Indonesia dalam memperluas pengaruh dan jaringan globalnya. Selain itu, studi ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemerintah daerah beradaptasi dan merespons dinamika globalisasi serta bagaimana kerja sama luar negeri dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya dan kota-kota lainnya di Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan paradiplomasi yang lebih efektif di masa mendatang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami tantangan dan peluang yang muncul dari kerja sama luar negeri, serta dalam meningkatkan kapasitas paradiplomasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kota-kota lain di Indonesia yang ingin mengoptimalkan kerja sama

internasional guna menghadapi tantangan global dan memperkuat posisi Surabaya dalam kancah internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dari jurnal karya **Faridatul Mu'arofa Fauzia** yang berjudul **“Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya Dan Kitakyushu Sebagai Bagian Dari Paradiplomasi”**.¹⁰ Dalam penelitian ini, Faridatul Mu'arofa Fauzia menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggabungkan antara konsep *Sustainable Development* dan paradiplomasi dalam mendeskripsikan kerja sama *sister city* Pemerintah Kota Surabaya dan Kitakyushu sebagai bagian dari paradiplomasi.

Pemerintah Kota Surabaya menjalankan beberapa strategi untuk menjalankan kerja sama luar negerinya bersama Pemerintah Kota Kitakyushu yakni pertama, komitmen hubungan *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu diwujudkan melalui penandatanganan MoU yang mencakup berbagai tujuan, seperti menciptakan masyarakat yang lebih hijau, mengembangkan program daur ulang, serta *capacity building*. Kedua, pertemuan dan rapat koordinasi rutin diadakan antara kedua pihak untuk merencanakan dan melaksanakan program Surabaya *Green City* 2018, yang berfokus pada pelestarian hutan dan pengembangan ekowisata. Ketiga, implementasi kerja sama ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan

¹⁰ Faridatul Mu'arofa Fauzia, 2021, *Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dan Kitakyushu Sebagai Bagian dari Paradiplomasi*. SIYAR Journal. Vol. 1. No. 2. Hal. 116–141.

beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta para pelajar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dan Kitakyushu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian hutan dan pengembangan ekowisata sebagai upaya mengatasi masalah lingkungan serta memaksimalkan manfaat dari program tersebut.

Selain itu, adapun persamaan dan perbedaan penelitian dari Faridatul Mu'arofa Fauzia dan penelitian penulis terletak pada subjeknya. Dimana dalam penelitian Faridatul Mu'arofa Fauzia lebih fokus menggali strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan program Surabaya *Green City* 2018 yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kitakyushu sebagai bentuk kerja sama *sister city*, sementara penelitian penulis berfokus kepada bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasi kerja sama luar negeri. Sedangkan untuk persamaannya sendiri sama-sama membahas tentang aktivitas kerja sama luar negeri kota Surabaya sebagai bagian dari paradiplomasi.

Penelitian kedua dari jurnal karya **Ari Asmono** dan **Hari Prasetyo** dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)”**.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh berbagai sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

¹¹ Ari Asmono dan Hari Prasetyo. 2023. *Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 7. No. 3.

Penelitian ini mengkaji kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan hubungan internasional setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah pasca era reformasi yang mengatur distribusi sumber daya secara merata, pemanfaatan aset daerah, serta keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah ini meliputi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme pembagian urusan. Dasar hukum yang melandasi kerjasama Surabaya dengan Kota Kitakyushu adalah Undang-undang Pemerintah Daerah Pasal 363 ayat (1) dan (2), dengan prinsip pelaksanaan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, keuntungan bersama, dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian Ari Asmono dan Hari Prasetyo dengan penulis terdapat pada subjeknya. Dimana dalam penelitian Ari Asmono dan Hari Prasetyo lebih spesifik membahas bagaimana Pemerintah Kota Surabaya memiliki wewenang untuk menjalankan hubungan internasionalnya sendiri dengan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada langkah-langkah yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan aktivitas hubungan internasional. Dan untuk persamaannya sendiri adalah sama-sama membahas tentang aktivitas paradiplomasi yang dijalankan oleh kota Surabaya sebagai Pemerintah Daerah.

Penelitian ketiga dari jurnal karya **Dzakiyah Adalatul Hikmah, Khusnul Prasetyo, Aditama Azmy Musaddad, Eka Arum Pramestya, dan Ika Devi Lestari** dengan judul **“Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)”**.¹² Dalam penelitian ini Dzakiyah Adalatul Hikmah dkk menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan teori *sound governance* dengan menganalisis 4 aktor yang terlibat dalam kerja sama tersebut, yakni *Government* (Pemerintah), *Private Sector* (Swasta), *Civil Society* (Masyarakat), dan Pihak Internasional.

Kota Surabaya dan Kota Liverpool berhasil menunjukkan komitmen kedua pihak sesuai dengan kontrak kerja sama yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU). Dengan demikian, dimensi *sound governance* benar-benar diterapkan secara proporsional, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memastikan kesuksesan program yang telah disepakati. Hal ini membuktikan bahwa teori *sound governance* diterapkan dengan baik dalam program pengiriman pesepakbola muda berbakat dari Surabaya ke Liverpool. Selain itu, keempat aktor utama dalam tata kelola yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor internasional telah menunjukkan kerja sama serta peran aktif mereka. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

¹² Dzakiyah Adalatul Hikmah. dkk. 2022. *Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)*. Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan. Vol. 8. No. 3. Hal. 10–20.

seperti Humas Pemkot, Dispora, dan Bagian Kerja Sama, memberikan dukungan maksimal sesuai kebutuhan program.

Penelitian penulis memiliki titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzakiyah Adalatul Hikmah, dkk. Secara substantif, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian dimana penelitian Hikmah secara khusus menganalisis peran multi-aktor (termasuk Pemerintah Kota Surabaya) dalam program sister city dengan Liverpool yang berorientasi pada pengembangan bakat pemain sepak bola muda melalui pelatihan di Inggris. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek implementasi paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta peran strategisnya dalam berbagai bentuk kerjasama internasional. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran pemerintah daerah dalam menjalin dan mengelola kerjasama lintas negara.

Penelitian keempat dari jurnal karya **Fadhlan Nur Hakiem** dengan judul **“Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I.Yogyakarta)”**.¹³ Penelitian Fadhlan Nur Hakiem mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua metode utama pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Secara teoritis, penelitian ini menerapkan kerangka konseptual yang menggabungkan teori keamanan manusia (*human*

¹³ Fadhlan Nur Hakiem. 2020. *Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov DI Yogyakarta)*. Dauliyah. Vol. 5. No. 1. Hal. 49-81.

security) dan paradiplomasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kerjasama internasional yang diinisiasi pemerintah daerah dapat berkontribusi pada penguatan keamanan manusia di tingkat nasional Indonesia.

Penelitian Fadhlán Nur Hakiem mengkaji implementasi kerjasama internasional oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pendekatan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan peran strategis pemerintah daerah dalam isu keamanan manusia (*human security*), dimana tanggung jawab keamanan tidak lagi menjadi berada di bawah pemerintah pusat. Studi ini menunjukkan bahwa aktor subnasional seperti Pemda D.I. Yogyakarta memiliki kapasitas setara dengan pemerintah pusat dalam upaya pemenuhan keamanan manusia. Namun demikian, implementasi kerjasama internasional di Yogyakarta belum mencapai tingkat optimal akibat berbagai hambatan struktural. Padahal, potensi kontribusi kerjasama internasional terhadap pembangunan manusia sangat signifikan, khususnya melalui program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kerjasama internasional dalam memperkuat keamanan manusia sangat bergantung pada sejauh mana program tersebut mampu menciptakan dampak langsung bagi pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian Fadhlán Nur Hakiem dengan penelitian penulis terletak pada objeknya. Penelitian milik Fadhlán Nur Hakiem berfokus membahas bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi isu keamanan manusia yang ada di daerahnya melalui berbagai kerja sama internasional yang telah dijalankan, sedangkan penelitian penulis berfokus membahas bagaimana Pemerintah Daerah berperan menjalankan kerja sama

internasional melalui paradiplomasi. Dan persamaan antara penelitian milik Fadhlán Nur Hakiem dan penelitian penulis terletak pada subjeknya yakni sama-sama membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam kerja sama luar negeri dalam mengatasi permasalahan daerah.

Penelitian kelima dari jurnal karya **Renny Candradewi Puspitarini, Fahrísya Tiko Septiarika, dan Randy Bramastya** yang berjudul **“Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerjasama *Smart City* Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul”**.¹⁴ Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme yang menolak konsepsi negara sebagai aktor tunggal (*unitary actor*) dalam hubungan internasional. Perspektif ini justru membuka ruang bagi partisipasi berbagai aktor non-negara. Dalam kerangka liberalisme, perdamaian global dapat tercapai melalui penguatan kerjasama internasional dibandingkan penyelesaian konflik, serta dengan memperluas keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya dalam urusan domestik tetapi juga kebijakan luar negeri.

Meskipun Pemerintah Kota Bandung tidak secara resmi menggunakan terminologi paradiplomasi, praktik kerjasama internasional yang dilakukannya mengimplementasikan tiga prinsip khas paradiplomasi yang membedakannya dari diplomasi konvensional. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang memposisikan negara sebagai aktor tunggal, paradiplomasi Kota Bandung ditandai oleh: (1)

¹⁴ Renny Puspitarini. dkk. 2021. *Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerjasama Smart City Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul*. PERSPEKTIF. Vol. 10. No. 2. Hal. 569-577.

delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama langsung dengan kota mitra asing; (2) inisiatif aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama; serta (3) integrasi kegiatan dalam jaringan transnasional. Implementasi prinsip-prinsip ini terlihat jelas dalam kerjasama *Smart City* melalui *Sister City* dengan Seoul, khususnya dalam mekanisme transfer kebijakan dari Seoul ke Bandung. Contoh konkretnya adalah program konsultasi kebijakan KSP 2017/18 yang berperan penting dalam reformasi sistem transportasi bus di Bandung.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian milik Renny Candradewi Puspitarini, Fahrisyah Tiko Septiarika, dan Randy Bramastya dengan penelitian penulis terletak pada objeknya. Penelitian mereka lebih fokus membahas bagaimana Pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan paradiplomasi dalam program *smart city* dalam kerja sama Kota Bandung dengan Kota Seoul, sedangkan penelitian milik penulis berfokus membahas tentang bagaimana implementasi paradiplomasi pada Pemerintah Kota Surabaya secara umum dengan melibatkan wali kota Surabaya sebagai pengambil keputusan paling utama. Dan persamaan antara penelitian milik Puspitarini, Septiarika, dan Bramastya dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi paradiplomasi dijalankan oleh pemerintah daerah.

Penelitian keenam dari skripsi karya **Helend Amabel Koswoyo** dengan judul “**Implementasi Kerjasama Sister City Denpasar-Perth Dalam**

Peningkatan Ekonomi Kreatif Bali 2020-2022”.¹⁵ Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi mengenai implementasi kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Perth, serta dokumen pendukung terkait perkembangan industri ekonomi kreatif di Bali. Sumber data mencakup: (1) laporan pelaksanaan kerjasama *sister city*, (2) publikasi mengenai industri ekonomi kreatif Bali yang diakses melalui berbagai platform digital, (3) artikel jurnal ilmiah, (4) portal berita *online*, serta (5) laporan tahunan resmi dari kedua pemerintah kota yang berkaitan dengan kerjasama *sister city* dan perkembangan ekonomi kreatif.

Kerjasama ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif di Bali. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara Denpasar dan Perth, muncul peluang baru dan jaringan kerja yang memperluas perkembangan industri kreatif di kedua kota. Beragam acara dan festival yang diadakan sebagai bagian dari kemitraan ini berhasil meningkatkan visibilitas dan popularitas Bali sebagai pusat wisata dan kreativitas, serta menghasilkan manfaat ekonomi melalui peluang bisnis baru dan pertukaran produk kreatif. Selain itu, kemitraan ini juga memperkaya komunitas kreatif di Bali dan Perth melalui pertukaran budaya dan pengetahuan, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

¹⁵ Helend Amabel Koswoyo. 2023. *Implementasi Kerjasama Sister City Denpasar-Perth Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif Bali 2020-2022 (Helend Amabel Koswoyo)*. Undergraduate thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Helend Amabel Koswoyo dan penelitian milik penulis memiliki perbedaan utama dalam hal fokus wilayah dan objek yang ditelaah. Penelitian Helend secara spesifik membahas paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Bali, sementara penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan kebijakan *sister city* di Surabaya. Di samping itu, penelitian Helend Amabel Koswoyo menyoroti implementasi paradiplomasi oleh pemerintah daerah secara keseluruhan, mencakup berbagai aspek dan upaya pemerintah daerah Bali, sementara penelitian penulis berfokus pada kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola hubungan internasionalnya. Meski demikian, kedua penelitian ini memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama membahas praktik paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah di Indonesia, mengungkap bagaimana pemerintah daerah memainkan peran aktif dalam hubungan internasional untuk mendorong pembangunan daerah masing-masing.

Penelitian ketujuh dari jurnal karya **Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, dan Havidz Ageng Prakoso** dengan judul “**Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020 2024**”.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan teori dari Alexander S. Kuznetsov yang membahas tentang dimensi konstitusional dan institusional paradiplomasi untuk menganalisis dinamika yang terjadi.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa berbagai tantangan dalam implementasi paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya telah menimbulkan

¹⁶ Hafiq Allhadad, dkk. 2025. *Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro.

dampak substantif pada dua aspek krusial: (1) menurunnya tingkat kredibilitas Surabaya sebagai mitra kerja sama di tingkat internasional, dan (2) terhambatnya pemanfaatan maksimal potensi kolaborasi, terutama pada program-program unggulan seperti kerjasama transfer teknologi dengan Busan (Korea Selatan) serta berbagai inisiatif berkelanjutan dengan mitra-mitra Eropa.

Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh Allhadad dkk. dengan studi ini dalam hal objek penelitian. Di mana penelitian Allhadad dkk, lebih berfokus pada analisis empat faktor penghambat efektivitas paradiplomasi Surabaya, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji peran kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional. Namun demikian, kedua penelitian memiliki titik temu dalam lingkup kajiannya, yaitu sama-sama mengeksplorasi praktik paradiplomasi yang diimplementasikan oleh Kota Surabaya. Persamaan ini merefleksikan kesamaan minat akademik terhadap peran pemerintah daerah dalam mendorong kerjasama internasional melalui pendekatan paradiplomasi.

Penelitian kedelapan dari tesis karya **Nayun Cho** dengan judul **“Paradiplomasi Kota Surabaya Dan Kota Busan Dalam Kerjasama Sister City”**.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan narasumber terkait, (2) kajian literatur dari berbagai sumber tertulis, serta (3) analisis konten dari berbagai situs online yang relevan. Data primer diperoleh

¹⁷ Nayun Cho. 2016. *Paradiplomasi Kota Surabaya Dan Kota Busan Dalam Kerjasama Sister City*. Tesis. Universitas Padjadjaran.

langsung melalui interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kepentingan lokal yang diusung pemerintah daerah pada hakikatnya dapat berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Studi komparatif menunjukkan perbedaan fokus antara Surabaya yang lebih menekankan pada pengembangan sektor ekonomi dan pendidikan, dengan Busan yang mengutamakan aspek *soft power* politik dan pertumbuhan ekonomi, keduanya secara sinergis mendukung kepentingan strategis negara masing-masing (Indonesia dan Korea Selatan). Kolaborasi berkelanjutan antar kedua kota ini dirancang sebagai kerangka kerja jangka panjang untuk memenuhi berbagai kepentingan nasional kedua negara dalam spektrum bidang yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian milik Nayun Cho. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian Nayun Cho berfokus pada bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama *sister city* dengan Busan, Korea Selatan. Sementara itu, penelitian milik penulis berfokus pada bagaimana bagaimana Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi dalam mengimplementasikan paradiplomasi secara keseluruhan. Adapun persamaan keduanya adalah sama-sama membahas tentang paradiplomasi di kota Surabaya.

Penelitian kesembilan dari jurnal karya **Rasta Hayuning Dzazira**, dan **Dhani Putra Pratama** yang berjudul “*Empowering Urban Diplomacy:*

Surabaya's Sister City Collaboration with Kitakyushu, Japan for Sustainable Development".¹⁸ Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan teori kerja sama internasional dan konsep paradiplomasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui program *Sister City* telah mengadopsi pendekatan *Green Sister City* sebagai model utama. Praktik paradiplomasi ini tidak hanya berperan sebagai pelengkap, melainkan secara strategis memperkuat diplomasi total pemerintah pusat melalui keterlibatan *multi-stakeholder* yang mencakup unsur masyarakat dan pelaku bisnis lokal. Lebih jauh, keberhasilan program ini merepresentasikan perkembangan signifikan kapasitas diplomasi Indonesia, khususnya dalam menunjukkan kemampuan aktor subnasional dalam menjalin dan mengelola hubungan internasional.

Penelitian milik Rasta Hayuning Dzazira dan Dhani Putra Pratama memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan utamanya terletak pada fokus objek penelitian, di mana Dzazira dan Pratama berfokus membahas kerja sama *sister city* Surabaya dengan Kitakyushu, Jepang, dalam program *Green Sister City* Sementara itu, penelitian milik penulis berfokus pada kebijakan Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dalam mengembangkan kerja sama luar negeri sebagai bentuk

¹⁸ Rasta Hayuning Dzazira, dan Dhani Putra Pratama. 2023. *Empowering Urban Diplomacy: Surabaya's Sister City Collaboration with Kitakyushu, Japan for Sustainable Development*. Journal of Paradiplomacy and City Networks. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

paradiplomasi. Adapun persamaan di antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kerja sama internasional yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian kesepuluh dari skripsi karya **Ni'mah Saadatun** dengan judul **“Alasan Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kota Kochi Jepang”**.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara, serta menggunakan teori paradiplomasi.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kochi dalam program *sister city* berangkat dari kesamaan identitas kedua kota sebagai kota pelabuhan yang strategis. Latar belakang inilah yang kemudian mendorong terjalannya kerja sama formal melalui MoU, dengan fokus utama pada pengembangan empat sektor kunci, yaitu ekonomi dan perdagangan, industri berbasis potensi lokal, pariwisata berkelanjutan, serta pertukaran pendidikan.

Penelitian milik Ni'mah Saadatun memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Saadatun berfokus pada mengkaji alasan Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kochi, Jepang. Sementara itu, penelitian milik penulis berfokus pada kebijakan Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dalam merumuskan kebijakan terkait

¹⁹ Ni'mah Saadatun. 2019. *Alasan Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kota Kochi Jepang*. Skripsi. Universitas Wahid Hasyim Semarang.

paradiplomasi. Adapun persamaan di antara keduanya adalah sama-sama mengkaji tentang paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu yang telah diulas, penelitian ini memiliki posisi yang berfokus pada kajian kebijakan Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya sebagai pemimpin daerah dalam mengimplementasikan paradiplomasi. Sementara penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji kebijakan luar negeri pada tingkat nasional atau pemimpin negara, penelitian ini memperluas wawasan mengenai diplomasi yang dijalankan di tingkat kota. Fokus penelitian pada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan kerja sama internasional memperkaya literatur tentang paradiplomasi dan kerja sama luar negeri di tingkat pemerintahan daerah.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Faridatul Mu'arofa Fauzia (2021): "Kerjasama <i>Sister City</i> Pemerintah Kota Surabaya Dan Kitakyushu Sebagai Bagian Dari Paradiplomasi"	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Konsep <i>Sustainable Development & Paradiplomasi</i>	Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan berbagai strategi dalam menjalin kerja sama internasional dengan Kota Kitakyushu. Kolaborasi ini difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, pembangunan komitmen berkelanjutan antar kedua kota; kedua, pelaksanaan program <i>Surabaya Green City 2018</i> sebagai wujud konkret kerja sama lingkungan; dan ketiga, penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses implementasi program.

2.	Ari Asmono dan Hari Prasetyo (2023): “Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama <i>Sister City</i> (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)”	Metodologi: Kualitatif	Pemerintah Kota Surabaya memiliki wewenang yang disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan aktivitas hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mencakup pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, yang dikenal sebagai pembagian urusan. Kewenangan Kota Surabaya untuk bekerja sama dengan Kota Kitakyushu didasarkan pada UU Pemda seperti tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2).
3.	Dzakiyah Adalatul Hikmah, Khusnul Prasetyo, Aditama Azmy Musaddad, Eka Arum Pramestya, dan Ika Devi Lestari (2022): “Analisis Dimensi Dan Peran Aktor <i>Sound Governance</i> dalam Kerja Sama <i>Sister City</i> Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)”	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Teori <i>Sound Governance</i>	Kota Surabaya dan Kota Liverpool berhasil menunjukkan komitmen mereka sesuai dengan kontrak kerja sama yang tertuang dalam <i>Letter of Intent</i> (LoI) dan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU). Dengan demikian, dimensi <i>sound governance</i> benar-benar diterapkan secara proporsional, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memastikan kesuksesan program yang telah disepakati.
4.	Fadhlan Nur Hakiem (2020): “Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia	Metodologi: Kualitatif Alat Analisa: Konsep Keamanan Manusia & Paradiplomasi	Tanggung jawab keamanan kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara. Aktor sub-nasional juga memiliki peran yang setara dengan negara dalam upaya memenuhi keamanan manusia. Namun seperti

	(Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I.Yogyakarta)”		yang terlihat dalam kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala yang dihadapi.
5.	Renny Candradewi Puspitarini, Fahrisyah Tiko Septiarika, dan Randy Bramastya (2021): “Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerjasama <i>Smart City</i> Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul”	Metodologi: Kualitatif Alat Analisa: Liberalisme	Pemerintah Kota Bandung tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menjalankan paradiplomasi, namun mereka telah menerapkan tiga prinsip utama yang mencirikan praktik paradiplomasi. Prinsip-prinsip ini membedakannya dari diplomasi tradisional, yang biasanya dipahami sebagai diplomasi yang dilakukan oleh negara sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional.
6.	Helend Amabel Koswoyo (2023): “Implementasi Kerjasama <i>Sister City</i> Denpasar-Perth Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif Bali 2020-2022”	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Liberalisme & Paradiplomasi	Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara Denpasar dan Perth, muncul peluang baru dan jaringan kerja yang memperluas perkembangan industri kreatif di kedua kota. Beragam acara dan festival yang diadakan sebagai bagian dari kemitraan ini berhasil meningkatkan visibilitas dan popularitas Bali sebagai pusat wisata dan kreativitas.
7.	Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, dan Havidz Ageng Prakoso (2025): “Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota	Metodologi: Deskriptif-Analitis Alat Analisa: Dimensi Konstitusional & Institusional Paradiplomasi	Tantangan-tantangan pada praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya berdampak signifikan pada kredibilitas Surabaya di mata mitra internasional dan menghambat optimalisasi potensi kerjasama yang ada,

	Surabaya 2020-2024”		terkhusus dalam program-program strategis seperti kolaborasi teknologi dengan Busan dan inisiatif lingkungan dengan kota-kota di Eropa.
8.	Nayun Cho (2016): “Paradiplomasi Kota Surabaya Dan Kota Busan Dalam Kerjasama <i>Sister City</i> ”	Metodologi: Kualitatif	Setiap pemerintah daerah memiliki kepentingan lokal yang secara tidak langsung dapat berdampak pada tercapainya kepentingan nasional negara mereka. Surabaya, lebih memprioritaskan kepentingan di bidang ekonomi dan pendidikan, sementara Busan fokus pada kepentingan politik (<i>soft power</i>) dan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung pencapaian kepentingan nasional Korea Selatan. Kerja sama yang terjalin secara berkelanjutan dan penuh potensi ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara dalam berbagai bidang untuk jangka panjang.
9.	Rasta Hayuning Dzazira, dan Dhani Putra Pratama (2023): “ <i>Empowering Urban Diplomacy: Surabaya’s Sister City Collaboration with Kitakyushu, Japan for Sustainable Development</i> ”	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Teori kerja sama internasional & Konsep paradiplomasi	Pemerintah Kota Surabaya menerapkan paradiplomasi melalui program <i>Sister City</i> untuk mewujudkan konsep <i>Green Sister City</i> . Inisiasi paradiplomasi ini secara efektif mendukung strategi diplomasi total pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Surabaya dan sektor swasta. Pelaksanaan program ini sekaligus membuktikan peningkatan kapasitas diplomasi

			Indonesia, khususnya di tingkat pemerintah daerah, dalam kancah hubungan internasional.
10.	Ni'mah Saadatun (2019): "Alasan Kerjasama <i>Sister City</i> Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kota Kochi Jepang"	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Teori Paradiplomasi	Kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kochi melalui program <i>sister city</i> didasari oleh kesamaan karakteristik sebagai kota pelabuhan. Kesamaan inilah yang menjadi pendorong utama terbentuknya kerja sama formal yang tertuang dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dengan fokus pada empat sektor utama: ekonomi dan perdagangan, industri, pariwisata, serta pendidikan.
11.	Muhammad Fariz Rayhan (2024): "Implementasi Paradiplomasi Kota Surabaya di Era Wali Kota Eri Cahyadi Periode 2021-2024"	Metodologi: Kualitatif deskriptif Alat Analisa: Konsep Paradiplomasi	Perkembangan kerja sama internasional Kota Surabaya telah terbangun dengan baik pada periode para wali kota sebelumnya, yang telah menanamkan dasar kuat untuk hubungan internasional dan menaruh harapan agar Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dapat menjaga serta memperkuat citra positif ini.

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah sebuah konsep dalam ilmu hubungan internasional yang menggambarkan kemampuan entitas selain negara, seperti pemerintah daerah,

pemerintah provinsi, dan satuan unit otonomi khusus, untuk melakukan kegiatan dan kebijakan luar negeri. Dengan kehadiran paradiplomasi, aktor selain negara memiliki kesempatan untuk terlibat dalam forum internasional dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di luar negeri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk aktif berpartisipasi dalam proses diplomasi dan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan internasional. Dengan demikian, paradiplomasi dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kedudukan di kancah internasional.²⁰

Konsep paradiplomasi pertama kali dikemukakan pada tahun 1980-an oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos melalui karya-karya akademis mereka. Menurut dua pakar ini, paradiplomasi merujuk pada kapasitas dan aktivitas yang dimiliki oleh *sub-state actors* dalam menjalin relasi internasional, dengan tujuan mendukung pencapaian kepentingan nasional secara lebih spesifik. Secara esensial, paradiplomasi merupakan bentuk inisiatif mandiri yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memperjuangkan berbagai kepentingan lokal di forum internasional, tanpa melepaskan diri dari kerangka kebijakan luar negeri nasional.

Duchacek dan Soldatos mendasarkan paradiplomasi pada tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Otonomi Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kemitraan dengan entitas lain di luar negeri tanpa adanya intervensi dari Pemerintah Pusat.

²⁰ Takdir Ali Mukti. *op. cit.* hal. 1-2

2. Kerja Sama Horizontal: Kerja sama dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain tanpa peduli struktur atau hierarki nasional.
3. Kompleksitas Hubungan Internasional: Hubungan internasional tidak hanya dilakukan antara negara-negara, tetapi juga melibatkan banyak aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok masyarakat sipil.²¹

Dalam praktiknya, aktivitas paradiplomasi yang dijalankan pemerintah daerah mencakup beberapa dimensi kunci. Konsep dimensional ini pertama kali dikembangkan oleh Brian Hocking dan kemudian disistematisasi oleh Aldecoa dan Keating dalam karya mereka yang berjudul *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Menurut kerangka teoritis mereka, dimensi-dimensi utama paradiplomasi meliputi:

1. Aims & Motivations

Aims and motivations dalam paradiplomasi menjelaskan rasionalitas dan tujuan strategis pemerintah daerah dalam menginisiasi hubungan internasional. Secara substantif, tujuan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kerangka utama: Pertama, sebagai aktor independen yang secara proaktif memperjuangkan kepentingan multidimensi (ekonomi, politik, sosio-kultural) dari tingkat lokal ke global. Kedua, sebagai mediator yang memfasilitasi artikulasi kepentingan dan isu-isu subnasional oleh berbagai stakeholders di forum internasional.

²¹ Helend Amabel Koswoyo. *Op. Cit.*

2. *Extent and Direction of Involvement*

Arah dan tingkat keterlibatan yang diambil oleh suatu daerah dalam paradiplomasi menjelaskan sejauh mana kehadiran internasional yang ditunjukkan oleh *sub-state actor*, arah yang diambil, serta peluang untuk memberikan pengaruh. Beberapa faktor memengaruhi keterlibatan daerah dalam paradiplomasi, di antaranya sumber daya birokrasi, letak geografis baik antarnegara maupun antar *sub-state actor*, lingkungan kebijakan dan posisi strategis wilayah, tingkat asimetri dalam sistem federal, serta besarnya kewenangan yang diberikan kepada *sub-state actor*.

3. *Structures and Resources*

Kapasitas suatu daerah dalam menjalankan paradiplomasi sangat ditentukan oleh dua faktor kunci: (1) karakteristik struktural sebagai entitas subnasional, dan (2) ketersediaan sumber daya strategis untuk memperjuangkan kepentingannya di panggung global. Observasi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan modal politik kuat dan basis sumber daya memadai cenderung lebih aktif dalam diplomasi internasional dibandingkan daerah dengan keterbatasan sumber daya. Namun perlu dicatat bahwa konsep 'sumber daya' dalam konteks ini bersifat multidimensional, tidak sekadar mencakup kapasitas fiskal dan pengaruh politik, tetapi juga meliputi keunggulan kompetitif birokrasi daerah dalam spesialisasi kebijakan tertentu yang mungkin menjadi *comparative advantage* dibanding pemerintah pusat.

4. *Levels of Participation*

Konsep level dalam paradiplomasi mengacu pada hierarki jejaring kerja yang memungkinkan kota-kota melaksanakan hubungan internasional. Secara operasional, level-level tersebut dapat dikategorikan menjadi lima ranah utama: (1) *subnational*, melibatkan interaksi antardaerah dalam satu negara; (2) *governmental*, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah asing; (3) *intergovernmental*, kolaborasi melalui organisasi antar-pemerintah; (4) *transgovernmental*, jaringan kerja teknis antar-instansi; serta (5) *transnational*, kemitraan yang melampaui batas negara dengan aktor non-pemerintah. Klasifikasi ini secara fundamental terkait dengan derajat dan bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam praktik paradiplomasi.

5. *Strategies*

Pemerintah daerah dapat menerapkan tiga strategi dalam menjalankan paradiplomasi. Pertama, strategi mediasi, di mana *sub-state actor* memanfaatkan saluran yang tersedia untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan nasional. Kedua, strategi primer, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk berperan langsung di tingkat internasional guna memperkuat kehadiran di panggung global. Terakhir, strategi sekunder, yang muncul ketika pemerintah daerah merasa kepentingannya tidak tercermin dalam kebijakan nasional, sehingga

mendorong mereka untuk melakukan lobi atau membangun koalisi dengan jaringan kota di berbagai belahan dunia.²²

Paradiplomasi merupakan sebuah konsep yang memungkinkan aktor-aktor selain negara untuk turut serta dalam dinamika hubungan internasional. Berdasarkan karakteristiknya, Pemerintah Kota Surabaya beserta dengan mitra luar negerinya berperan sebagai perwakilan politik luar negeri yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan serta menjalin kerja sama guna mencapai kepentingan bersama. Melalui paradiplomasi, Pemerintah Kota Surabaya dapat membangun kemitraan dengan pemerintah daerah di luar negeri secara lebih fleksibel dan strategis, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan daerahnya. Dengan demikian, paradiplomasi memberikan ruang bagi kota untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global. Konsep ini menjadi relevan sebagai landasan penelitian karena mencakup kajian mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan aktor internasional serta perannya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional secara lebih efektif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif sebagai metode utama, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena aktual dalam konteks spesifik. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya

²² Brian Hocking. 2009. *Patrolling the 'frontier': Globalization, Localization and The 'Actorness' of Non-Central Governments*. Routledge. Vol. 9. No. 1. Hal. 17-39.

dengan tujuan penelitian yang berfokus pada dokumentasi komprehensif mengenai implementasi kebijakan kerjasama internasional oleh Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi (2021-2024). Ciri khas metode deskriptif adalah kemampuannya untuk memetakan realitas empiris secara objektif melalui pengumpulan dan analisis data faktual, tanpa memerlukan verifikasi hipotesis atau penelusuran hubungan sebab-akibat. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif akan membantu menggali berbagai aspek kebijakan, strategi, aktor, dan hasil dari kerja sama luar negeri Surabaya, serta memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan kota. Metode ini juga relevan untuk mendokumentasikan secara rinci proses diplomasi kota yang dilakukan, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Kota Surabaya dalam jaringan kerja sama internasional.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan karakteristik utama sebagai berikut: Pertama, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data langsung dari sumber primer. Kedua, pendekatan bersifat induktif dimana analisis berkembang secara organik dari temuan lapangan tanpa terikat pada pembuktian hipotesis pra-penelitian. Secara operasional, metode ini memfasilitasi eksplorasi mendalam terhadap berbagai dimensi kebijakan dan implementasi kerjasama internasional Pemkot Surabaya, khususnya melalui teknik wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dikaji secara komprehensif

untuk mengungkap konteks kebijakan, proses implementasi, serta dampak yang dihasilkan.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Waktu

Penelitian ini terbatas pada periode pertama kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya yakni pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Periode pertama kepemimpinan Eri Cahyadi menentukan arah paradiplomasi Kota Surabaya yang juga akan berdampak pada kepemimpinan wali kota selanjutnya. Masa jabatan ini awalnya direncanakan untuk berlangsung dari tahun 2021 hingga 2026. Namun, karena ketentuan dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masa jabatan Eri Cahyadi berakhir lebih awal pada tahun 2024 untuk menyesuaikan jadwal Pilkada Serentak yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini menyebabkan masa kepemimpinannya hanya mencakup kurang dari empat tahun, yang menjadi periode fokus dalam penelitian ini.

1.6.3.2 Batasan Materi

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada implementasi paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya secara spesifik selama periode pertama kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi (2021-2024). Batasan ini dimaksudkan untuk memungkinkan kajian yang lebih mendalam terhadap mekanisme, strategi, dan dampak paradiplomasi Surabaya tanpa mengurangi kompleksitas analisis.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang akurat. Pertama, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara yang penulis lakukan bersama Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Kota Surabaya, sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan selama penulis menjalani magang di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dari bulan Februari hingga Juni 2024, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk mengamati langsung proses kerja dan dinamika yang berlangsung dalam tim kerjasama luar negeri. Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan informasi mendalam tentang strategi yang digunakan dalam membangun kerja sama luar negeri, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta bagaimana pemerintah kota menavigasi hubungan internasional dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Wawancara ini juga memberikan gambaran tentang peran Bapak Djoenedie Dodiek S. S.H. selaku Ketua Tim Kerja Kerjasama bersama timnya dalam mengajukan kebijakan kepada wali kota, bernegosiasi dengan mitra luar negeri, serta memonitor hasil dari kerja sama yang telah terjalin. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini sangat penting untuk memahami secara lebih detail proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan paradiplomasi.

Selain itu, data sekunder penulis dapatkan melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Sumber-sumber ini memberikan data tambahan mengenai kerja sama internasional di tingkat pemerintah daerah, serta peran kota dalam hubungan internasional. Studi kepustakaan ini tidak hanya memberikan pemahaman tambahan, tetapi juga sebagai alat untuk membandingkan hasil kerja sama Kota Surabaya dengan praktik yang ada di kota-kota lain.

Selanjutnya, penulis memanfaatkan artikel berita dari berbagai media lokal maupun nasional yang melaporkan kerja sama luar negeri Kota Surabaya sebagai data sekunder. Berita-berita tersebut memberikan informasi penting terkait kegiatan, kesepakatan, dan hasil dari berbagai program kerja sama internasional yang dijalankan oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Artikel berita ini menjadi sumber data sekunder yang relevan dalam mengidentifikasi peran aktif Surabaya dalam paradiplomasi.

1.7. Argumen Pokok

Implementasi kerja sama luar negeri Kota Surabaya di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi periode 2021–2024 menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dijalankan telah mencerminkan tiga prinsip utama. Dengan kewenangan yang dimiliki dalam kerangka desentralisasi, Kota Surabaya dapat secara mandiri membangun hubungan dengan pemerintah daerah di luar negeri, serta memperkuat jejaring internasional melalui kerja sama yang bersifat setara. Dalam praktiknya,

implementasi paradiplomasi Kota Surabaya dapat dianalisis melalui lima aspek utama. *Aims & motivations* mencerminkan tujuan kota Surabaya dalam memperkuat daya saing dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta budaya dari kerja sama internasional. *Extent and direction of involvement* menunjukkan sejauh mana keterlibatan Kota Surabaya dalam menjalin hubungan luar negeri serta arah kebijakan yang diambil. *Structures and resources* berkaitan dengan kapasitas birokrasi dan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan paradiplomasi secara efektif. Sementara itu, *levels of participation* mencerminkan berbagai jaringan yang dimanfaatkan, baik dalam lingkup pemerintah daerah, maupun forum internasional. Terakhir, *strategies* yang diterapkan menunjukkan bagaimana Kota Surabaya menyesuaikan pendekatan paradiplomasi seperti aksi langsung di tingkat global, maupun upaya lobi dan koalisi dengan jaringan kota dunia. Dengan demikian, paradiplomasi Kota Surabaya di era Wali Kota Eri Cahyadi tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi Surabaya dalam kancah internasional.

1.8. Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB 1	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.5 Kerangka Teori/ Konsep
	1.6 Metode Penelitian
	1.6.1 Jenis Penelitian

	<p>1.6.2 Teknik Analisis Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB 2	<p>PERKEMBANGAN PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA 2.1 Wewenang Implementasi Paradiplomasi Kota Surabaya 2.2 Riwayat Paradiplomasi Kota Surabaya 2.3 Kerja Sama Internasional Kota Surabaya di Masa Kepemimpinan Eri Cahyadi 2.4 Dampak Paradiplomasi Terhadap Pembangunan Kota Surabaya</p>
BAB 3	<p>DIMENSI PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA 3.1 Arah & Motivasi Paradiplomasi Surabaya 3.2 Keterlibatan Surabaya Dalam Paradiplomasi 3.3 Sumber Daya Birokrasi Surabaya yang Mendukung Paradiplomasi 3.4 Level Partisipasi Kerja Sama Internasional Surabaya 3.5 Strategi yang Dijalankan Surabaya Dalam Paradiplomasi</p>
BAB 4	<p>PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>

